

**ANALISIS VALUE FOR MONEY ANGGARAN PENDAPATAN  
PADA PEMERINTAH KOTA MEDAN**

**SKRIPSI**

*Diajukan untuk Memenuhi Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)  
Program Studi Akuntansi*



**Oleh :**

**Nama : LAILA INTAN SYIFA NASRI**

**NPM : 1405170507**

**Program Studi : AKUNTANSI**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2018**





بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh :

Nama Lengkap : LAILA INTAN SYIFA NASRI  
N.P.M : 1405170507  
Program Studi : AKUNTANSI  
Konsentrasi : AKUNTANSI KEUANGAN  
Judul Skripsi : ANALISIS VALUE FOR MONEY ANGGARAN  
PENDAPATAN PADA PEMERINTAH KOTA MEDAN

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian  
mempertahankan skripsi

Medan, Maret 2018

Pembimbing Skripsi

(SUKMA LESMANA, SE, M.Si)

Diketahui/Disetujui

Oleh :

Ketua Program Studi Akuntansi  
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMSU

(FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si)

Dekan  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

(H. JANURI, SE, MM, M.Si)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No. 3 ☎ (061) 6624567 Medan 20238

**BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI**

UNIVERSITAS/ PTS : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS  
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI  
JENJANG : STRATA SATU (S-1)

KETUA PROGRAM STUDI: FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si  
DOSEN PEMBIMBING : SUKMA LESMANA, SE, M.Si

NAMA MAHASISWA : LAILA INTAN SYIFA NASRI  
NPM : 1405170507  
KONSENTRASI : AKUNTANSI KEUANGAN  
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS VALUE FOR MONEY ANGGARAN  
PENDAPATAN PADA PEMERINTAH KOTA MEDAN

TGL	MATERI BIMBINGAN	PARAF	KETERANGAN
15/3 2018	- Hasil wawancara diperoleh di Hari pertama  - Pembahasan dan wawancara Hari pertama dikumpulkan dari / pertama selain kemudian hari kedua untuk wawancara		

Pembimbing Skripsi

SUKMA LESMANA, SE, M.Si

Medan, Maret 2018  
Diketahui/ Disetujui Oleh  
Ketua Program Studi Akuntansi

FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si

## PERNYATAAN SKRIPSI

Saya bertanda tangan dibawah ini:

Nama : LAILA INTAN SYIFA NASRI  
NPM : 1405170507  
Program : Strata - 1  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
Program Studi : Akuntansi  
Judul : Analisis *Value for Money* Anggaran Pendapatan pada  
Pemerintah Kota Medan

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa data-data dalam skripsi atau data-data lainnya adalah benar saya peroleh dari KANTOR WALIKOTA MEDAN.

Dan apabila ternyata dikemudian hari data-data dari skripsi ini salah dan merupakan hasil **PLAGIAT** karya orang lain maka dengan ini saya bersedia menerima sanksi akademik.

Medan, Maret 2018

Saya yang menyatakan



LAILA INTAN SYIFA NASRI

## ABSTRAK

### **LAILA INTAN SYIFA NASRI NPM. 1405170507. Analisis *Value for Money* Anggaran Pendapatan Pada Pemerintah Kota Medan. Skripsi**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja keuangan Pemerintah Kota Medan yang diukur dengan menggunakan metode *value for money*, untuk mengetahui penyebab rasio ekonomis dan rasio efektivitas pendapatan daerah Kota Medan mengalami penurunan dan juga untuk mengetahui penyebab rasio efisiensi penggunaan belanja daerah mengalami peningkatan. Pendekatan penelitian ini berupa pendekatan deskriptif yakni penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan dan menyajikan data yang diterima dari Pemerintah Kota Medan berupa data-data jumlah Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Medan sehingga memberikan gambaran yang cukup jelas untuk penulis menganalisis serta membandingkan dengan teori yang ada. Teknik analisa data yang digunakan berupa teknik analisis deskriptif kuantitatif.

Hasil penelitian menunjukkan rasio ekonomis Pemerintah Kota Medan mengalami penurunan, rasio efisiensi belanja daerah mengalami peningkatan, rasio efektivitas pendapatan daerah mengalami penurunan, dan kinerja Pemerintah Kota Medan yang diukur dengan menggunakan *value for money* mengalami penurunan hal ini terjadi dikarenakan kurang maksimalnya pendapatan daerah, terbukti dengan pendapatan daerah yang tidak mampu mencapai target, dan meningkatnya belanja daerah Pemerintah Kota Medan, bahkan melebihi dari target yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Medan. Faktor penyebab *value for money* belum memenuhi standar dikarenakan besarnya realisasi atas belanja daerah yang dikeluarkan, besarnya belanja yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Medan bahkan realisasi belanja daerah melebihi dari target yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, pemerintah daerah tidak mampu dalam mencapai target pendapatan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah tersebut. Cara meningkatkan *value for money* dari segi rasio ekonomi dengan cara memaksimalkan biaya belanja modal, dari segi rasio efisiensi dengan cara menekankan biaya belanja untuk belanja pegawai dan meningkatkan belanja modal, dari segi efektivitas dengan cara semaksimal mungkin dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

*Kata Kunci : Value for money, Ekonomis, Efisiensi, Efektivitas, Kinerja Keuangan*

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT atas segala limpahan rahmat, Anugerah serta berkah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, serta shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi suri tauladan bagi kita semua. Peneliti ini tidak terlepas dari bimbingan dan dukungan berbagai pihak.

Didalam penulisan skripsi ini, penulis telah berusaha dan berupaya dengan segala kemampuan yang ada. Namun untuk itu penulis bersedia menerima saran dan kritik dari semua pihak yang sifatnya menambah kesempurnaan penulis ini.

Dalam mempersiapkan skripsi ini, peneliti banyak menerima bantuan atau bimbingan dan petunjuk. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya terutama kepada kedua orang tua tercinta ayahanda Drs. Harun Nasib, MS, Spd.I dan ibunda tercinta Sri Darmawati Yunus, serta kedua adik saya yang telah memberikan dukungan dan memberikan do'a serta pengorbanan yang sangat besar yang telah diberikan penulis, kiranya Allah SWT membalasnya dengan berkah-Nya. Dan juga terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) Medan.

2. Bapak H. Januri, SE, MM, M.Siselaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) Medan.
3. Bapak Ade Gunawan, SE, M.Si selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Hasrudy Tanjung, SE, M.Si selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Fitriani Saragih, SE, M.Si selaku Ketua Jurusan Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) Medan.
6. Ibu Zulia Hanum, SE, M.Si selaku Sekretaris Jurusan Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) Medan.
7. Bapak Sukma Lesmana, SE, M.Si selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan yang sangat berguna bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi.
8. Kepada dosen pembimbing akademik Henny Zurika Lubis, SE, M.Si yang telah memberikan ilmu dan nasehat kepada peneliti.
9. Seluruh Bapak/Ibu Dosen dan staf Pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) Medan, yang telah membekali penulis ilmu pengetahuan.
10. Dan kepada seluruh teman-teman C siang yang selalu memberikan dukungan dan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.
11. Semua orang yang telah memberikan masukan dukungan dan saran yang tak terhingga.

Saya selaku penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, semoga Allah SWT selalu melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya kepada kita semua dan semoga kiranya skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi Penulis sendiri dan bagi siapa saja yang membacanya. Aamiin YaaRabbal' Aalamiin.  
Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Medan, Maret2018

Penulis

Laila Intan Syifa Nasri

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b>	
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
<b>BAB II LANDASAN TEORI.....</b>	<b>10</b>
A. Uraian Teori .....	10
1. Keuangan Daerah.....	10
a. Pengertian Keuangan Daerah.....	10
b. Manajemen Keuangan Daerah.....	11
c. Sumber Pendapatan Daerah.....	13
2. <i>Value for Money</i> .....	16
a. Pengertian <i>Value for Money</i> dan Indikator <i>Value for Money</i> .....	16
b. Tujuan <i>Value for Money</i> .....	18
c. Manfaat Implementasi <i>Value for Money</i> .....	18
d. Langkah-langkah Pengukuran <i>Value for Money</i> .....	19
3. Kinerja Keuangan Daerah .....	22
a. Pengertian Kinerja Keuangan Daerah dan Indikator Keuangan Daerah.....	22

4.	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah .....	26
a.	Anggaran Pendapatan Daerah.....	26
b.	Anggaran Belanja Daerah.....	26
5.	Penelitian Terdahulu .....	27
B.	Kerangka Berpikir .....	29
<b>BAB III</b>	<b>METODE PENELITIAN.....</b>	<b>32</b>
A.	Pendekatan Penelitian .....	32
B.	Defenisi Operasional.....	32
C.	Tempat dan Waktu Penelitian .....	34
D.	Jenis dan Sumber Data.....	34
E.	Teknik Pengumpulan Data .....	35
F.	Teknik Analisis Data.....	35
<b>BAB IV</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>37</b>
A.	Hasil Penelitian.....	37
1.	Gambaran Umum Pemerintah Kota Medan .....	37
2.	Deskripsi Data .....	38
3.	Hasil Wawancara .....	44
B.	Pembahasan .....	49
<b>BAB V</b>	<b>KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>54</b>
A.	Kesimpulan.....	54
B.	Saran .....	55

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Medan Tahun 2012-2013 .....	5
Tabel 1.2	Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Medan Tahun 2014-2015 .....	6
Tabel 1.3	Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Medan Tahun 2016 .....	7
Tabel 2.1	Klasifikasi Pengukuran Ekonomi.....	19
Tabel 2.2	Klasifikasi Pengukuran Efisiensi .....	20
Tabel 2.3	Klasifikasi Pengukuran Efektivitas .....	21
Tabel 4.1	Perhitungan rasio Ekonomi.....	38
Tabel 4.2	Perhitungan rasio Efisiensi .....	40
Tabel 4.3	Perhitungan rasio Efektivitas .....	42

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kerangka Berpikir .....	30
------------	-------------------------	----

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Di dalam suatu negara dengan wilayah yang luas membutuhkan suatu sistem pemerintahan (governance) yang baik. Sistem ini sangat diperlukan setidaknya oleh dua hal: pertama sebagai alat untuk melaksanakan berbagai pelayanan publik di berbagai daerah, kedua sebagai alat bagi masyarakat setempat untuk berperan serta aktif dalam menentukan arah dan cara mengembangkan taraf hidupnya sendiri selaras dengan peluang dan tantangan yang dihadapi dalam koridor-koridor kepentingan nasional.

Keberhasilan otonomi daerah tidak lepas dari kinerja pemerintah dalam mengelola keuangan daerahnya. Ukuran kinerja pemerintah berdasarkan anggaran berbasis kinerja dapat diukur dengan menggunakan konsep *value for money*, yakni ekonomis, efisiensi, dan efektivitas. Dengan demikian, suatu daerah yang kinerja keuangannya dinyatakan baik berarti daerah tersebut memiliki kemampuan keuangan untuk membiayai pelaksanaan otonomi daerah (Deddi, 2009:164).

Penilaian kinerja terhadap lembaga atau orang tidak hanya berlaku pada lembaga atau orang yang berorientasi profit saja, melainkan juga perlu dilakukan pada lembaga atau orang non komersial. Hal ini dimaksudkan agar dapat diketahui sejauh mana pemerintah menjalankan tugasnya dalam roda pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat dengan menyampaikan laporan keuangan.

Kemampuan pemerintah daerah khususnya Pemerintah Kota Medan dalam mengelola keuangan termuat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang menggambarkan kemampuan Pemerintah daerah dalam membiayai pelaksanaan tugas pembangunan. Dalam menjalankan otonomi daerah, pemerintah dituntut untuk menjalankan roda pemerintahan yang efektif dan efisien mampu mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan, serta meningkatkan pemerataan dan keadilan dengan mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah.

Tuntutan yang tinggi pada kebutuhan pengukuran kinerja pemerintah daerah serta pengukuran kinerja pemerintah daerah mempunyai banyak tujuan. Tujuan tersebut paling tidak untuk meningkatkan kinerja dan meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah. Untuk ini pemerintah daerah dituntut untuk mampu membangun ukuran kinerja yang baik. Ukuran kinerja yang disusun tidak dapat hanya dengan menggunakan satu ukuran. Oleh karena itu perlu ukuran yang berbeda untuk tujuan yang berbeda (Mahsun 2006:299).

Menurut (Bastian,2006), untuk mengukur tingkat kinerja dari Pemerintah Kota Medan dapat dilakukan berdasarkan sistem *Value for Money*. Pengukuran dan penilaian kinerja adalah suatu alat manajemen untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas. Pengukuran kinerja organisasi sektor publik untuk memenuhi hal-hal sebagai berikut: membantu memperbaiki kinerja pemerintah sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi sektor publik dalam pemberian layanan, pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan, dan juga mewujudkan pertanggungjawaban dan juga memperbaiki komunikasi kelembagaan.

Tuntutan akan kualitas dan profesionalisme sektor publik dapat dinilai dengan konsep *Value for Money* (Nilai daripada uang) dalam menjalankan aktivitasnya. Selain itu, tuntutan yang lain adalah perlunya akuntabilitas publik dan privatisasi terhadap perusahaan-perusahaan milik publik untuk menciptakan *good publik and corporate governance* (Mardiasmo 2002:27). *Value for Money* merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada tiga elemen utama, yaitu: ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Ekonomi diukur melalui rasio antara masukan aktual dengan masukan rencana. Efisiensi diukur melalui rasio efisiensi yang direncanakan. Efektivitas diukur dengan membandingkan keluaran realisasi (aktual) dengan keluaran menurut rencana (Mardiasmo 2002:27).

*Value for money* dalam konteks otonomi daerah merupakan jembatan untuk menghantarkan pemerintah daerah mencapai *good governance*. Untuk mendukung dilakukannya pengelolaan dana publik yang mendasarkan konsep *value for money*, maka diperlukan sistem pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah yang baik. Dalam mengukur *value for money* indikator yang digunakan yaitu diambil dari nilai anggaran dan realisasi belanja daerah dan anggaran dan realisasi pendapatan asli daerah.

Sumatera Utara sebagai salah satu provinsi yang ada di Indonesia memiliki banyak potensi yang dapat digali untuk dapat dijadikan sumber pendapatan dari berbagai sektor. Perekonomian Sumatera Utara digerakkan oleh sektor perdagangan/hotel/restoran, telekomunikasi dan transportasi, dan industri pengelolaan yang dapat meningkatkan PAD. Dan salah satu pendapatan terbesar Sumatera Utara adalah pajak daerah dan retribusi daerah. Untuk

mengetahui kinerja pemerintah daerah salah satunya dapat diukur dengan konsep *value for money* yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Jika kinerja keuangan Pemerintah Daerah sudah memenuhi kriteria ekonomi, efisiensi, dan efektif dapat meningkatkan pendapatan asli daerah.

Tetapi permasalahan yang sering timbul dalam pelaksanaan APBD adalah rumitnya pengelolaan dana khususnya penggunaan dana yang tidak terdisiplin sesuai anggaran yang ditetapkan. Hal ini menyebabkan realisasi penggunaan anggaran tidak mencapai target sampai akhir tahun sehingga pertanggungjawaban penggunaan dana yang ekonomis dan efektif sering tidak tercapai.

Permasalahan lain yang terjadi adalah perencanaan dan pengelolaan APBD saat ini belum maksimal sesuai Peraturan Pemerintah nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Permendagri nomor 13 Tahun 2006 yang dijadikan standar untuk penilaian kinerja keuangan pemerintah daerah terhadap pencapaian target dan realisasi program dan kebijakan baik dalam komponen pendapatan, komponen belanja, maupun komponen pembiayaan menjadi lemah posisinya.

Penilaian keberhasilan APBD sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah lebih ditekankan pada pencapaian target, sehingga kurang memperhatikan bagaimana proses penganggaran yang dilakukan mulai dari tahap perencanaan sampai pada tahap penilaian.

Berikut ini adalah laporan realisasi anggaran pemerintah kota medan dari tahun 2012-2016:

**Tabel 1.1**  
**Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Medan**  
**Tahun 2012-2013**  
**(dalam rupiah)**

Uraian	2012		2013	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Pendapatan Daerah	4.034.121.333.860,45	2.998.203.912.475,38	4.105.900.462.377,32	3.276.344.285.159,73
Pendapatan Asli Daerah	1.594.454.835.916,45	1.147.901.461.607,38	1.578.247.819.724,32	1.206.169.709.147,73
Pendapatan Transfer	2.405.001.397.944,00	1.822.682.350.868,00	2.517.923.942.653	2.060.845.776.012
Lain-lain Pendapatan yang sah	34.665.100.000,00	27.620.100.000,00	10.728.800.000	9.328.800.000
Belanja	4.080.935.662.619,00	3.021.172.391.041,67	4.237.560.638.891	3.224.449.048.408,88
Belanja Operasi	3.065.546.186.332,00	2.462.668.653.257,67	3.202.546.141.941	2.593.084.833.763,88
Belanja Modal	1.008.389.476.287	558.428.737.784	1.028.014.496.950	630.802.958.785
Belanja Tak Terduga	7.000.000.000	75.000.00	7.000.000.000	561.255.860
Penerimaan Daerah	96.992.296.499,55	80.672.196.504,32	146.493.435.934	33.838.947.039,68
Pengeluaran Daerah	50.107.967.741	35.195.474.136,35	15.833.259.421	12.701.122.846,29
Pembiayaan Bersih	46.814.328.758,55	45.476.722.367,97	130.660.176.513,68	21.137.824.193,39
SILPA	0	22.508.243.801,68	0	73.033.060.944,24

*Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah*

Pada tabel laporan realisasi anggaran diatas menjelaskan bahwa anggaran dan realisasi pada belanja pada tahun 2013 mengalami kenaikan dari tahun 2012. Sedangkan untuk realisasi pendapatan daerah mengalami kenaikan dari tahun 2012.

**Tabel 1.2**  
**Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Medan**  
**Tahun 2014-2015**  
**(dalam rupiah)**

Uraian	2014		2015	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Pendapatan Daerah	4.560.412.529.543,87	4.042.115.828.231,62	5.046.111.839.162,45	4.259.044.490.715,42
Pendapatan Asli Daerah	1.678.116.623.125	1.384.246.114.729,62	1.794.704.774.012,45	1.489.723.189.088,42
Pendapatan Transfer	2.881.185.547.418,87	2.657.869.713.502	3.243.256.160.750	2.769.321.301.627
Lain-lain Pendapatan yang sah	1.110.359.000	0	8.150.904.400	0
Belanja	4.625.169.942.881	3.723.643.299.085,60	5.467.952.757.114	4.374.968.274.136,94
Belanja Operasi	3.579.613.342.151	2.939.241.615.113,97	4.111.280.501.953	3.457.801.274.812,16
Belanja Modal	1.038.556.600.730	783.883.177.721,63	1.349.672.255.161	916.888.037.907,78
Belanja Tak Terduga	7.000.000.000	518.506.250	7.000.000.000	278.961.417
Penerimaan Daerah	91.011.413.337,13	73.033.060.944,24	436.840.917.951,55	370.720.769.951,55
Pengeluaran Daerah	26.254.000.000	20.784.820.138,71	15.000.000.000	2.221.380.000
Pembiayaan Bersih	64.757.413.337,13	52.248.240.805,53	421.840.917.951,55	368.499.389.951,55
SILPA	0	370.720.769.951,55	0	252.575.606.530,03

*Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah*

Pada tabel laporan realisasi anggaran diatas menjelaskan bahwa anggaran dan realisasi pada belanja pada tahun 2014 mengalami kenaikan dari tahun 2015. Sedangkan untuk realisasi pendapatan daerah mengalami kenaikan dari tahun 2015.

**Tabel 1.3**  
**Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Medan**  
**Tahun 2016**  
**(dalam rupiah)**

Uraian	2016	
	Anggaran	Realisasi
Pendapatan Daerah	5.490.162.683.364,97	4.308.116.916.024,91
Pendapatan Asli Daerah	1.884.851.580.562,97	1.535.309.574.014,91
Pendapatan Transfer	3.605.032.623.407	2.772.807.342.010
Lain-lain Pendapatan yang sah	278.479.395	0
Belanja	5.735.922.591.995	4.523.672.134.655,15
Belanja Operasi	4.413.092.921.342	3.584.201.617.240,59
Belanja Modal	1.306.656.265.903	936.599.131.961
Transfer Bantuan Keuangan	1.815.697.900	1.559.196.340
Penerimaan Pembiayaan	252.575.606.530,03	252.575.606.530,03
Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000.000	0
Pembiayaan Bersih	247.575.606.530,03	252.575.606.530,03
SILPA	0	35.461.191.559,79

*Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah*

Pada tabel laporan realisasi anggaran diatas menjelaskan bahwa laporan realisasi anggaran pemerintah kota medan meliputi pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Medan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Medan jika dilihat dari tahun 2012-2016 mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Penelitian ini pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, Pane (2017), dari hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja pemerintah Kota Medan masih tergolong kurang signifikan yang menyebabkan rasio ekonomis masih kurang ekonomis, rasio efisiensi masih kurang efisien, dan rasio efektivitas masih kurang efektif. Dampak dari pengukuran tersebut berdampak langsung terhadap penerapan atau rencana belanja yang sudah direncanakan sebelumnya dan peningkatan akses dan kualitas infrastruktur serta Utilitas Kota.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian. Adapun judul yang diangkat penulis dalam penelitian ini adalah “**Analisis *Value for Money* anggaran pendapatan Pemerintah Kota Medan**”.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan, identifikasi masalah yang terdapat pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Rasio Ekonomis atas pembelanjaan daerah ditahun 2012, tahun 2013, dan tahun 2016 mengalami penurunan.
2. Rasio Efisiensi atas pendapatan daerah untuk tahun 2016 mengalami peningkatan.
3. Rasio Efektivitas atas pendapatan daerah untuk tahun 2012 dan tahun 2016 mengalami penurunan.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah, maka dapat dirumuskan beberapa masalah yang akan menjadi fokus penelitian, yaitu sebagai berikut:

1. Mengapa rasio *Value for Money* pada Pemerintah Kota Medan belum memenuhi standar?
2. Bagaimana meningkatkan rasio *Value for Money* pada Pemerintah Kota Medan?

## **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui kinerja keuangan Pemerintah Kota Medan dengan menggunakan metode *value for money*.
- b. Untuk mengetahui penyebab rasio ekonomis dan rasio efektivitas pendapatan daerah Kota Medan mengalami penurunan.
- c. Untuk mengetahui penyebab rasio efisiensi penggunaan belanja daerah mengalami peningkatan.

### **2. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari dilakukannya penelitian ini adalah:

- a. Bagi Penulis, menambahkan pemahaman penulis tentang pengukuran kinerja keuangan pemerintah jika diukur dengan *Value for Money*.
- b. Bagi Pemerintah Daerah, sebagai tambahan bahan referensi dalam menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Daerah dan alternatif masukan untuk meningkatkan pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah.
- c. Bagi Peneliti Selanjutnya, dapat menjadi referensi dan perbandingan bagi peneliti-peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Uraian Teori**

##### **1. Keuangan Daerah**

###### **a. Pengertian Keuangan Daerah**

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk juga di dalamnya segala bentuk kekayaan ataupun harta yang berhubungan dengan hak dan kewajiban atas daerah tersebut, yang terdapat dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Halim, 2007). Keuangan Daerah dapat juga diartikan sebagai semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, juga dengan segala satuan, baik yang berupa uang maupun barang, yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum di miliki/dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai ketentuan/peraturan perundangan yang berlaku (Halim, 2007).

Dari pengertian diatas dapat dilihat bahwa dalam keuangan daerah terdapat dua unsur penting yaitu:

- 1) Semua hak dimaksudkan sebagai hak untuk memungut pajak daerah, retribusi daerah dan/atau penerimaan dan sumber-sumber lain sesuai ketentuan yang berlaku merupakan penerimaan daerah sehingga menambah kekayaan daerah.
- 2) Kewajiban daerah dapat berupa kewajiban untuk membayar atau sehubungan dengan adanya tagihan kepada daerah dalam rangka

pembiayaan rumah tangga daerah serta pelaksanaan tugas pembangunan oleh daerah yang bersangkutan.

#### **b. Manajemen Keuangan Daerah**

Guna mewujudkan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel, dibutuhkan pengelolaan dengan suatu sistem manajemen keuangan yang jelas dan berdaya guna. Manajemen merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dari pengertian tersebut, jelas bahwa manajemen mempunyai empat fungsi dasar, yaitu perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian.

Konsep dasar dari manajemen tersebut dapat diaplikasikan dalam berbagai jenis organisasi, termasuk lingkungan organisasi sector publik tidak terkecuali dalam pengelolaan keuangan daerah. Beberapa prinsip penting manajemen keuangan daerah yaitu:

- 1) Taat pada peraturan perundang-undangan, dengan maksud bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- 2) Efektif merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.
- 3) Efisien merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu.

- 4) Ekonomis merupakan perolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga terendah.
- 5) Transparan merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah.
- 6) Bertanggungjawab merupakan wujud dari kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
- 7) Keadilan adalah keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya dan/atau keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan yang objektif.
- 8) Kepatutan adalah tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan proposional.
- 9) Manfaat maksudnya keuangan daerah diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Secara garis besar, manajemen keuangan daerah dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu manajemen penerimaan daerah dan manajemen pengeluaran daerah. Evaluasi terhadap pengelolaan keuangan daerah dan pembiayaan pembangunan daerah mempunyai implikasi yang sangat luas. Kedua komponen tersebut akan sangat menentukan kedudukan suatu pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah (Halim, 2002).

### c. Sumber Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah, sebagaimana yang telah didefinisikan sebelumnya, mempunyai makna sebagai hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan. Sumber pendapatan daerah diperoleh dari:

#### 1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD terdiri dari:

##### a) Pajak Daerah

Ketentuan mengenai pajak daerah ditetapkan dengan undang-undang. Sedangkan penentuan tarif dan tata cara pemungutan pajak daerah ditetapkan dengan peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

##### b) Retribusi Daerah

Sebagaimana pajak daerah, ketentuan mengenai kontribusi juga ditetapkan dengan undang-undang. Sementara penentuan tarif dan tata cara pemungutan retribusi daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

##### c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup: bagian laba atas penyertaan modal baik pada perusahaan milik daerah, perusahaan milik pemerintah, maupun pada perusahaan milik swasta atau

kelompok usaha masyarakat. Ketentuan mengenai hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

d) Lain-lain PAD yang sah

Meliputi dari: hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih antara nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, serta komisi, potongan, apapun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau jasa oleh daerah.

2. Dana Perimbangan

Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dilakukan kepada daerah untuk mendanai keseluruhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Sumber dana yang berasal dari pos Dana Perimbangan terdiri dari:

a) Dana Bagi Hasil

Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

b) Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerintahan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

c) Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Pemerintah menetapkan kriteria DAK yang meliputi kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis. Kriteria umum ditetapkan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dalam APBD. Kriteria khusus ditetapkan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan karakteristik daerah. Sedangkan kriteria teknis diterapkan oleh kementerian negara departemen teknis.

3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain PAD dan dana perimbangan yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan yang diterapkan.

- a) Hibah merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pemerintah negara asing, badan/ lembaga asing, badan/lembaga dalam negeri atau perseorangan, baik dalam bentuk devisa, rupiah maupun barang dan/atau jasa, termasuk tenaga ahli dan pelatihan yang tidak perlu dibayar kembali.
- b) Dana Darurat adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah yang mengalami bencana nasional, peristiwa luar biasa, dan/atau krisis ekonomi.

## 2. *Value for Money*

### a. Pengertian *Value for Money* dan Indikator *Value for Money*

#### 1. Pengertian *Value for Money*

*Value for money* merupakan inti pengukuran kinerja pada organisasi pemerintah. Kinerja pemerintah tidak dapat dinilai dari output yang dihasilkan saja, akan tetapi harus mempertimbangkan input, output, dan outcome secara bersama-sama. Bahkan untuk beberapa hal perlu ditambahkan pengukuran distribusi dan cakupan layanan (*equity and service coverage*).

*Value for money* menurut pendapat (Mardiasmo 2002:4) merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada tiga elemen utama yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Ekonomi: perolehan input dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada harga yang terendah. Ekonomi merupakan perbandingan input dengan *input value* yang dinyatakan dalam satuan moneter. Efisiensi: perbandingan output/input yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan. Efektivitas: tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Secara sederhana efektivitas merupakan perbandingan *outcome* dengan input.

Kriteria pokok yang mendasari pelaksanaan manajemen publik dewasa ini adalah ekonomi, efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas publik. Tujuan yang dikehendaki oleh masyarakat mencakup pertanggungjawaban mengenai pelaksanaan *value for money* yaitu: ekonomis (hemat cermat) dalam pengadaan dan alokasi sumber daya, efisiensi (berdaya guna) dalam penggunaan sumber daya dalam arti penggunaannya diminimalkan dan

hasilnya dimaksimalkan (*maximizing benefits and minimizing costs*), serta efektif (berhasil guna) dalam arti mencapai tujuan dan sasaran.

## **2. Indikator *Value for Money***

Peranan indikator kinerja dalam menyediakan informasi sebagai pertimbangan untuk pembuatan keputusan. Hal ini tidak berarti bahwa suatu indikator akan memberikan ukuran pencapaian program yang definitif.

Menurut (Mardiasmo 2009:131) menyatakan bahwa Indikator *Value for money* dibagi menjadi dua bagian seperti yang dijelaskan antara lain:

1. Indikator alokasi biaya (ekonomi dan efisiensi)
2. Indikator kualitas pelayanan (efisiensi)

Indikator kinerja dapat dimanfaatkan oleh pihak internal maupun eksternal. Pihak internal dapat menggunakannya dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan serta efisiensi biaya. Dengan kata lain, indikator kinerja berperan untuk menunjukkan, memberikan indikasi atau memfokuskan perhatian pada bidang yang relevan dilakukan tindakan perbaikan.

Pihak eksternal dapat menggunakan indikator kinerja sebagai kontrol dan sekaligus sebagai informasi dalam rangka mengukur tingkat akuntabilitas publik. Pembuatan dan penggunaan indikator kinerja tersebut membantu setiap pelaku utama dalam proses pengeluaran publik. Indikator kinerja akan membantu para manajer publik untuk memonitor pencapaian program dan mengidentifikasi masalah yang penting.

**b. Tujuan *Value For Money***

Tujuan pelaksanaan *value for money* adalah, ekonomi: hemat cermat dalam pengadaan dan alokasi sumber daya. efisiensi: Berdaya guna dalam penggunaan sumber daya efektivitas: berhasil guna dalam arti mencapai tujuan dan sasaran.

*equity*: Keadilan dalam mendapatkan pelayanan publik. *equality*: Kesetaraan dalam penggunaan sumber daya.

Tujuan lain yang dikehendaki terkait pelaksanaan *value for money* adalah:

- 1) Meningkatkan efektivitas pelayanan publik, dalam arti pelayanan yang diberikan tepat sasaran.
- 2) Meningkatkan mutu pelayanan public
- 3) Menurunkan biaya pelayanan publik karena hilangnya inefisiensi dan terjadinya penghematan dalam penggunaan input
- 4) Alokasi belanja yang lebih berorientasi pada kepentingan public
- 5) Meningkatkan kesadaran akan uang publik (*public costs awareness*) sebagai akar pelaksanaan akuntabilitas publik.

**c. Manfaat Implementasi *Value for money***

Penerapan konsep *value for money* dalam pengukuran kinerja pada organisasi sektor publik tentunya memberikan manfaat bagi organisasi itu sendiri maupun masyarakat. Manfaat yang dikendaki dalam pelaksanaan *value for money* pada organisasi sektor publik yaitu ekonomis dalam penggunaan sumber daya dan efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran (Mardiasmo, 2009:130).

Adapun manfaat yang diharapkan dengan adanya implementasi value for money adalah:

- 1) Meningkatkan efektivitas pelayanan publik
- 2) Meningkatkan mutu pelayanan publik
- 3) Menurunkan biaya pelayanan publik karena efisiensi dan penghematan input
- 4) Alokasi belanja yang berorientasi pada kepentingan publik
- 5) Meningkatkan kesadaran atas penggunaan uang publik, demi akuntabilitas (Muindro, 2012:9)

Dari berbagai manfaat yang disebutkan diatas, dapat disimpulkan bahwa penerapan value for money dalam pengukuran kinerja organisasi sektor publik sangat membantu suatu instansi pemerintah agar dapat memberikan pelayanan pada masyarakat dengan tepat sasaran sehingga tercipta mutu pelayanan yang baik dengan penggunaan sumber daya yang ekonomis dan efisien.

#### **d. Langkah-langkah Pengukuran value for money**

##### **1. Pengukuran Ekonomi**

Pengukuran ekonomi hanya mempertimbangkan masukan yang digunakan, ekonomi merupakan ukuran relative. Mardiasmo (2009:4) menyebutkan bahwa ekonomi merupakan perbandingan antara *input* dan *input value*. *Input* dalam hal ini adalah target anggaran, sedangkan *input value* adalah realisasi anggaran.

Jadi dapat disimpulkan bahwa suatu kinerja dikatakan ekonomis apabila realisasi anggaran lebih kecil dari pada target anggaran dan dapat mencapai output sesuai dengan yang telah ditetapkan. Dari penjelasan diatas, secara

matematis pengukuran ekonomi dapat dilakukan dengan perhitungan sebagai berikut:

$$Ekonomi = \frac{\text{Realiasi biaya untuk memperoleh pendapatan}}{\text{Anggaran biaya untuk memperoleh pendapatan}} \times 100\%$$

Untuk mengetahui seberapa besar tingkat rasio ekonomis dari hasil perhitungan yang dilakukan, maka dapat menggunakan formula rasio ekonomis adalah klasifikasi atas pengukuran rasio ekonomi.

**Tabel 2.1**  
**Klasifikasi Pengukuran Ekonomis**

Persentase	Kriteria
100% Keatas	Sangat Ekonomis
90%-100%	Ekonomis
80%-90%	Cukup Ekonomis
60%-80%	Kurang Ekonomis
Kurang dari 60%	Tidak Ekonomis

*Sumber: Kepmendagri No.600.900-327*

## 2. Pengukuran Efisiensi

Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan. Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah-rendahnya (Halim, 2012:133).

Pengukuran tingkat efisiensi memerlukan data-data realisasi biaya untuk memperoleh pendapatan dan data realisasi pendapatan (Mahsun, 2006:187).

Rumus perhitungannya sebagai berikut:

$$Efisiensi = \frac{\text{Realisasi biaya untuk memperoleh pendapatan}}{\text{Realisasi pendapatan}} \times 100\%$$

Pengukuran efisiensi tidak dinyatakan dalam bentuk absolut tetapi dalam bentuk relatif karena efisiensi diukur dengan membandingkan keluaran dan masukan. Perbaikan efisiensi dapat dilakukan dengan:

- 1) Meningkatkan output pada tingkat input yang sama
- 2) Meningkatkan output dalam proporsi yang lebih besar daripada proporsi peningkatan input
- 3) Menurunkan input pada tingkatan output yang sama
- 4) Menurunkan input dalam proporsi yang lebih besar daripada proporsi penurunan output.

Untuk mengetahui seberapa besar tingkat rasio efisiensi dari hasil perhitungan yang dilakukan, maka dapat menggunakan formula rasio efisiensi adalah klasifikasi atas pengukuran rasio efisiensi.

**Tabel 2.2**  
**Klasifikasi Pengukuran Efisiensi**

<b>Persentase</b>	<b>Kriteria</b>
100% Keatas	Tidak Efisien
90% -100%	Kurang Efisien
80% -90%	Cukup Efisien
60% -80%	Efisien
Kurang dari 60%	Sangat Efisien

*Sumber: Kepmendagri No.600.900-327*

### 3. Pengukuran Efektivitas

Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Efektivitas tidak menyatakan tentang berapa besar biaya yang telah dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut. Suatu organisasi sektor publik dapat dikatakan efektif apabila organisasi tersebut dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Mardiasmo, 2009:134). Jadi secara sistematis, efektivitas dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$Efektivitas = \frac{\text{Realisasi pendapatan}}{\text{Target pendapatan}} \times 100\%$$

Untuk mengetahui tingkat efektivitas dari hasil perhitungan menggunakan formula efektivitas adalah klasifikasi pengukuran efektivitas.

**Tabel 2.3**  
**Klasifikasi Pengukuran Efektivitas**

<b>Persentase</b>	<b>Kriteria</b>
100% Keatas	Sangat Efektif
90%-100%	Efektif
80%-90%	Cukup Efektif
60%-80%	Kurang Efektif
Kurang dari 60%	Tidak Efektif

*Sumber: Kepmendagri No.600.900-327*

### **3. Kinerja Keuangan Daerah**

#### **a. Pengertian Kinerja Keuangan Daerah dan Indikator Kinerja Keuangan Daerah**

##### **1. Pengertian Kinerja Keuangan Daerah**

Kinerja merupakan pencapaian atas apa yang direncanakan, baik oleh pribadi maupun organisasi. Apabila pencapaian sesuai dengan yang direncanakan, maka kinerja yang dilakukan terlaksana dengan baik. Apabila pencapaian melebihi dari apa yang direncanakan dapat dikatakan kinerjanya sangat bagus. Apabila pencapaian tidak sesuai dengan apa yang direncanakan atau kurang dari apa yang direncanakan, maka kinerjanya jelek. Kinerja keuangan adalah suatu ukuran kinerja yang menggunakan indikator keuangan. Analisis kinerja keuangan pada dasarnya dilakukan untuk menilai kinerja di masa lalu dengan melakukan berbagai analisis sehingga diperoleh posisi keuangan yang mewakili realitas entitas dan potensi-potensi kinerja yang akan berlanjut.

Salah satu alat untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah adalah dengan melaksanakan analisis rasio terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya (Halim, 2007: 230). Penggunaan analisis rasio pada sektor publik khususnya terhadap APBD belum banyak dilakukan, sehingga secara teori belum ada kesepakatan secara bulat mengenai nama dan kaidah pengukurannya. Meskipun demikian dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang transparan, jujur, demokratis, efektif, efisien dan akuntabel, analisis rasio terhadap APBD perlu dilaksanakan meskipun kaidah pengakuntansian dalam APBD berbeda dengan keuangan yang dimiliki oleh perusahaan swasta (Halim, 2007: 231-232).

Analisis rasio keuangan pada APBD dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi. Selain itu dapat pula dilakukan dengan cara membandingkan dengan rasio keuangan pemerintah daerah tertentu dengan rasio keuangan daerah lain yang terdekat ataupun potensi daerahnya relatif sama untuk dilihat bagaimana posisi keuangan pemerintah daerah tersebut terhadap pemerintah daerah lainnya.

Pengertian analisis keuangan itu sendiri adalah sebuah cara untuk menganalisis laporan keuangan yang mengungkapkan hubungan antara suatu jumlah dengan jumlah lainnya atau antara suatu pos dengan pos lainnya. Penggunaan analisis keuangan sebagai alat analisis kinerja secara umum telah digunakan oleh lembaga komersial (Deddi, 2009). Dalam rangka mengukur kinerja dan kemampuan keuangan daerah dalam mengelola diperlukan analisis rasio keuangan terhadap pendapatan belanja daerah.

Pengelolaan keuangan daerah yang transparan, jujur, demokratis, efektif, efisien dan akuntabel, analisis rasio keuangan terhadap pendapatan belanja daerah perlu dilaksanakan (Bastian, 2003).

Berdasarkan studi yang dilakukan oleh Halim dalam bukunya yang berjudul *Akuntansi Keuangan Daerah*, analisis rasio keuangan dibagi menjadi dua yaitu analisis kinerja keuangan dan analisis kemampuan keuangan. (Halim, 2007: 223).

## **2. Indikator Kinerja Keuangan Daerah**

Istilah “ukuran kinerja” pada dasarnya berbeda dengan istilah “indikator kinerja”. Ukuran kinerja mengacu pada penilaian kinerja secara langsung, sedangkan indikator kinerja mengacu pada penilaian kinerja secara tidak langsung, yaitu hal-hal yang sifatnya hanya merupakan indikasi-indikasi kinerja.

Menurut Halim (2012:135), di sisi lain, inti dari pengukuran kinerja dari organisasi pemerintahan adalah implementasi konsep *Value for Money*. *Value for Money* memiliki tiga komponen yaitu: ekonomi, efisiensi dan efektif. Untuk bisa mengukur tingkat ekonomi, efisiensi, dan efektivitas, organisasi pemerintahan harus dapat mengetahui tingkat *input*, *output*, dan *outcome*, dimana Halim menjelaskan:

### **1) Indikator Masukan (input)**

Input adalah semua jenis sumber daya masukan yang digunakan dalam suatu proses untuk menghasilkan output. Pengukuran input adalah

pengukuran sumber daya yang dikonsumsi oleh suatu proses dalam rangka menghasilkan output.

2) Indikator Keluaran (output)

Output adalah hasil langsung dari suatu proses. Pengukuran output adalah pengukuran keluaran yang dihasilkan dari proses. Ukuran output menunjukkan hasil implementasi program atau aktivitas.

3) Indikator Pencapaian Hasil (outcome)

Outcome adalah hasil yang dicapai dari suatu program atau kegiatan yang dibandingkan dengan hasil yang diharapkan. Pengukuran outcome adalah mengukur nilai kualitas dari output tersebut.

Menurut Mardiasmo (2002:128), peran indikator kinerja bagi pemerintahan adalah sebagai berikut:

- a) Untuk membantu memperjelas tujuan organisasi.
- b) Untuk mengevaluasi target aktif yang dihasilkan.
- c) Sebagai masukan untuk menentukan skema intensif manajerial.
- d) Memungkinkan bagi pemakai jasa layanan pemerintah untuk melakukan pilihan.
- e) Untuk menunjukkan standart kinerja.
- f) Untuk menunjukkan efektivitas.
- g) Untuk membantu menentukan aktivitas yang memiliki efektivitas biaya yang paling baik untuk mencapai target sasaran.
- h) Untuk meningkatkan wilayah, bagian, atau proses yang masih potensial untuk dilakukan penghematan biaya.

#### **4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)**

##### **a. Anggaran Pendapatan Daerah**

Pendapatan daerah merupakan penerimaan yang sangat penting bagi pemerintah daerah dalam menunjang pembangunan daerah guna membiayai proyek-proyek dan kegiatan-kegiatan daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah yang dimaksud dengan Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan kas daerah dalam periode tahun anggaran tertentu menjadi hak daerah.

Sedangkan menurut Halim (2002:64) yang menyatakan bahwa semua penerimaan daerah aktiva atau penurunan utang dalam berbagai sumber dalam periode tahun anggaran bersangkutan.

Berdasarkan kedua pengertian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa pendapatan daerah merupakan penerimaan yang diperoleh pemerintah daerah yang dapat ditinjau dari tingkat kenaikan aktiva ataupun penurunan utang yang dapat digunakan oleh pemerintah dalam membangun dan mengembangkan suatu daerah dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

##### **b. Anggaran Belanja Daerah**

Menurut Halim (2002), belanja daerah adalah pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk melaksanakan wewenang dan tanggungjawab kepada masyarakat dan pemerintah di atasnya.

Sedangkan menurut Indra Bastian dan Gatot Soepriyono (2003) yang mengemukakan bahwa belanja daerah adalah penurunan manfaat ekonomis

masa depan atau jasa potensial selama periode pelaporan dalam bentuk arus kas keluar, atau konsumsi aktiva/ekuitas netto, selain yang berhubungan dengan distribusi ke entitas ekonomi itu sendiri.

Dari pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi/kabupaten/kota yang terdiri atas urusan wajib, urusan pilihan, dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

## 5. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang berkaitan dengan Analisis *Value for Money* Anggaran Pendapatan ini telah dilakukan oleh para peneliti pada berbagai instansi daerah dan karakteristik organisasi yang berbeda seperti yang penulis uraikan dibawah ini:

NO	NAMA	JUDUL PENELITIAN	HASIL PENELITIAN
1	Hanifa Apriza (2016)	Analisis <i>Value for Money</i> Dalam Mengukur Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	Dilihat dari segi ekonomi kinerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2012 dan 2015 mengalami kurang ekonomis. Dilihat dari segi efisiensi Kinerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara untuk

			<p>memungut PAD telah memenuhi kriteria sangat efisien.</p> <p>Dilihat dari segi efektivitas Kinerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara untuk memungut PAD belum memenuhi kriteria standar pengukuran <i>value for money</i>.</p>
2	Untari Salnatun (2016)	Analisis Pengukuran Kinerja Pemerintah Kota Medan Dengan Menggunakan Konsep <i>Value for Money</i> tahun 2011-2015	<p>Dapat disimpulkan bahwa pada rasio ekonomi, rasio efisiensi dan rasio efektivitas untuk tahun 2011 sampai tahun 2015 mengalami penurunan, hal ini terjadi dikarenakan tidak tercapainya target atas Pendapatan Daerah, dan juga meningkatnya jumlah Belanja Daerah Kota Medan, dimana realisasi belanja daerah Kota Medan lebih besar dibandingkan dengan pendapatan daerah, hal ini menunjukkan bahwa kinerja Pemerintah Daerah Kota Medan mengalami defisit atau kerugian.</p>
3	Defia Rizky Pane (2017)	Analisis <i>Value for Money</i> Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Medan Tahun 2011-2015	<p>Dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kota Medan masih tergolong belum sepenuhnya baik, karena salah satu indikator pengukurannya yaitu dari rasio efisiensi tergolong kurang efisien, sedangkan rasio ekonomis dan rasio efektivitas masing-masing tergolong dalam kategori cukup ekonomis dan efektif.</p>

## B. Kerangka Berpikir

*Value for Money* merupakan inti pengukuran kinerja pada organisasi pemerintah. Kinerja pemerintah tidak dapat dinilai dari output yang dihasilkan saja, akan tetapi harus mempertimbangkan input, output, dan outcome secara bersama-sama. Bahkan untuk beberapa hal perlu ditambahkan pengukuran distribusi dan cakupan layanan (*equity and service coverage*). Tujuan *value for money* adalah untuk meningkatkan akuntabilitas lembaga sektor publik dan memperbaiki kinerja pemerintah. (Mardiasmo, 2009).

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut, dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Halim, 2007).

Untuk mengukur tingkat kinerja dari Pemerintah Kota Medan dapat dilakukan berdasarkan konsep *value for money*, dengan menggunakan konsep ini, Pemerintah Kota Medan dapat memperhitungkan seberapa besar pendapatan asli daerah yang berdasarkan dari jumlah pajak daerahnya yang dapat dinilai dari tingkat ekonomi, efisiensi, dan efektivitas pelaksanaan suatu kegiatan.

Berdasarkan dari Permendagri No. 13 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa untuk Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dapat disebutkan bahwa untuk struktur APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan.

Ekonomi adalah mengukur tingkat kehematan dari pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan organisasi sektor publik, dimana pengukuran

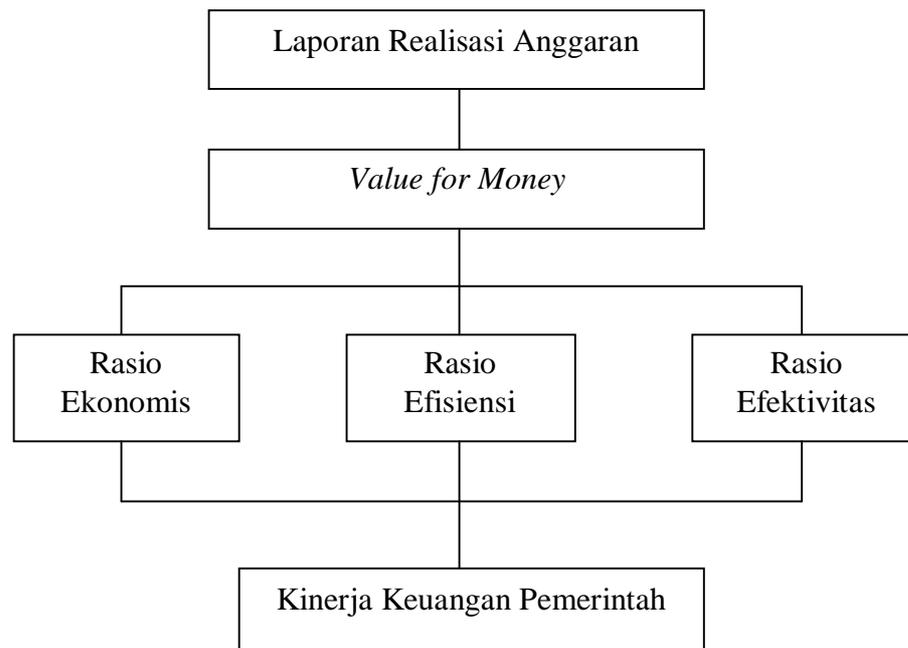
tersebut memerlukan data anggaran pengeluaran dan realisasinya. Semakin besar persentase ekonomis maka kinerja keuangan pemerintah daerah semakin baik.

Efisiensi adalah perbandingan yang terbaik antara input (masukan) dan output (hasil antara keuntungan dengan sumber-sumber yang dipergunakan). Semakin kecil persentase efisiensi maka kinerja keuangan pemerintah daerah semakin baik.

Efektivitas adalah tingkat keberhasilan suatu program dengan target yang telah ditetapkan. Jika suatu organisasi berhasil mencapai tujuannya, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan efektif. Efektivitas hanya melihat apakah suatu program telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya (Mardiasmo, 2009:134).

Mahsun (2006: 179) menyatakan “fungsi rasio ekonomi adalah mengukur tingkat kehematan dari pengeluaran organisasi sektor publik”. Rasio yang menggambarkan perbandingan biaya dengan realisasi pendapatan menunjukkan rasio efisiensi (Halim, 2008). Perbandingan kemampuan pemerintah daerah merealisasikan PAD dibanding dengan target yang ditetapkan menunjukkan rasio efektivitas (Halim, 2008).

Hasil perhitungan rasio ekonomis, efisiensi, serta efektivitas tersebut dapat menggambarkan kinerja keuangan yang dapat diukur value for money dalam pendapatan dan belanja daerah kota medan yang dapat dilihat dalam kerangka berpikir dibawah ini:



*Gambar 2.1 Kerangka Berpikir*

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif yang dilakukan dengan mengumpulkan dan menyajikan data yang diterima dari Pemerintah Kota Medan berupa data-data jumlah anggaran pendapatan dan belanja daerah, realisasi pendapatan dan belanja daerah kota medan sehingga memberikan gambaran yang cukup jelas untuk penulis menganalisis serta membandingkan dengan teori yang ada.

#### **B. Defenisi Operasional Variabel**

Defenisi operasional adalah menjelaskan karakteristik dari objek kedalam elemen-elemen yang dapat diobservasi yang menyebabkan konsep dapat diukur dan dioperasionalkan didalam penelitian.

##### *1. Value for Money*

*Value for Money* merupakan inti pengukuran kinerja pada unit-unit kerja pemerintah dan indikator yang memberikan informasi kepada kita apakah anggaran (dana) yang dibelanjakan menghasilkan suatu nilai tertentu bagi masyarakatnya. Berikut akan dijelaskan konsep *Value for Money* yang dikenal 3E.

a. Rasio Ekonomis

Pengukuran tingkat ekonomis memerlukan data-data anggaran biaya dan realisasi biaya. Teknik analisis untuk mengukur tingkat ekonomis adalah:

$$\text{Ekonomis} = \frac{\text{Realisasi Biaya}}{\text{Anggaran Biaya}} \times 100\%$$

b. Rasio Efisiensi

Rasio efisiensi membandingkan antara besarnya biaya yang dikeluarkan dengan pendapatan yang terealisasi. Rasio efisiensi dirumuskan dengan:

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Pendapatan}}{\text{Biaya}} \times 100\%$$

c. Rasio Efektivitas

Rasio ini menggambarkan perbandingan antara realisasi pendapatan dengan targetnya. Rasio efektivitas dirumuskan dengan:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Target Pendapatan}} \times 100\%$$

2. Anggaran Pendapatan

Anggaran pendapatan adalah rencana pendapatan yang akan dihasilkan oleh Pemerintah Daerah yang disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan.

Dalam penelitian ini anggaran pendapatan yang digunakan dari tahun 2012 sampai tahun 2016.

Adapun kisi-kisi wawancara dapat dilihat sebagai berikut:

No.	Variabel	Indikator	No. Item
1	Anggaran Pendapatan	1. Penyusunan Anggaran Pendapatan 2. Realisasi Anggaran 3. Sumber Penerimaan	1-5 6-7 8-9
2	<i>Value for Money</i>	1. Ekonomis 2. Efisiensi 3. Efektivitas	10-11 12-13 14-15

### C. Tempat dan Waktu Penelitian

#### 1. Tempat Penelitian

Penelitian dilakukan pada Kantor Pemerintahan Kota Medan Badan Pengelola Keuangan Daerah yang beralamat di Jalan Kapten Maulana Lubis No. 2 Medan 20112 Provinsi Sumatera Utara.

#### 2. Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian ini dimulai pada bulan Desember 2017 sampai dengan Februari 2018.

### D. Jenis dan Sumber Data

#### 1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif berupa Laporan Realisasi Anggaran, yaitu dengan mempelajari, mengamati dan menganalisis dokumen-dokumen yang berhubungan dengan objek penelitian.

#### 2. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu:

1. Data primer, adalah data yang diambil langsung dari objek penelitian yaitu hasil dari wawancara dengan pihak-pihak yang terkait di Kantor Walikota Medan.
2. Data sekunder, yaitu data-data yang berasal dari perusahaan yang berupa bukti, laporan historis yang tersusun dalam arsip dan hal-hal yang berkenaan materi pembahasan skripsi.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik yang digunakan untuk memperoleh data dalam penelitian ini adalah pengamatan langsung, wawancara, dan studi dokumentasi.

1. Teknik Wawancara, yaitu dengan cara melakukan tanya jawab atau wawancara langsung dengan bagian-bagian yang berwenang dan pegawai yang terlibat didalam perusahaan.
2. Teknik Dokumentasi, yaitu serangkaian informasi dan dokumen yang berupa laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah pada Pemerintah Kota Medan tahun 2012-2016.

#### **F. Teknik Analisis Data**

Analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah data deskriptif, deskriptif adalah metode analisis dengan terlebih dahulu mengumpulkan data sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai masalah yang diteliti.

Langkah-langkah yang dibuat penulis dalam teknik analisis data ini adalah sebagai berikut:

1. Menghitung rasio ekonomi, rasio efisiensi, dan rasio efektivitas anggaran pendapatan dengan menggunakan data yang diperoleh.
2. Menganalisis hasil perhitungan rasio ekonomi, rasio efisiensi, dan rasio efektivitas anggaran pendapatan.
3. Menarik kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **1. Gambaran Umum Pemerintah Kota Medan**

Pemerintah Kota Medan yang merupakan salah satu bagian dari Provinsi Sumatera Utara yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengelola sumber pendapatan daerahnya sendiri. Untuk kelangsungan dan kemajuan dari Kota Medan maka diharapkan Kota Medan mampu menggali, mengelola, dan memaksimalkan potensi sumber daya yang ada di Kota Medan. Dengan terus menggali, mengelola dan memaksimalkan potensi sumber daya yang ada di Kota Medan, maka nantinya akan mampu meningkatkan pajak daerah, sehingga mampu memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah.

Secara geografis, Kota Medan memiliki kedudukan strategis sebab berbatasan langsung dengan Selat Malaka dibagian Utara, sehingga relatif dekat dengan kota-kota/negara yang lebih maju seperti Pulau Penang Malaysia, Singapura dan lain-lain. Demikian juga secara demografis Kota Medan diperkirakan memiliki pangsa pasar barang dan jasa yang relatif besar dimana tahun 2007 telah mencapai 2.083.156 jiwa. Demikian juga secara ekonomis dengan struktur ekonomi yang didominasi sektor tertier dan sekunder, Kota Medan sangat potensial berkembang menjadi pusat perdagangan dan keuangan regional Nasional.

## 2. Deskripsi Data

Penilaian Kinerja Badan Pengelolaan keuangan dan aset negara Provinsi Sumatera Utara berdasarkan konsep *value for money* sebagai berikut.

### a. Rasio Ekonomis

Pengertian ekonomi (hemat/tepat guna) sering disebut kehematan yang mencakup juga pengelolaan secara hati-hati atau cermat dan tidak ada pemborosan. Suatu kegiatan operasional dikatakan ekonomis bila dapat menghilangkan atau mengurangi biaya yang tidak perlu (Mardiasmo, 2002:131).

Tingkat ekonomi digunakan untuk mengukur tingkat kehematan dari pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan organisasi sektor publik. Pengukuran tingkat ekonomi memerlukan data-data anggaran pengeluaran dan realisasinya (Mahsun, 2006:186).

Berikut diuraikan perhitungan rasio ekonomis berdasarkan rumus yang digunakan yaitu sebagai berikut:

$$\text{Rasio Ekonomis} = \frac{\text{Realiasi biaya untuk memperoleh pendapatan}}{\text{Anggaran biaya untuk memperoleh pendapatan}} \times 100\%$$

Ketentuan:

- 1) Jika > 100% maka Sangat Ekonomis
- 2) Jika 90%-100% maka Ekonomis
- 3) Jika 80%-90% maka Cukup Ekonomis
- 4) Jika 60%-80% maka Kurang Ekonomis
- 5) Jika < 60% maka Tidak Ekonomis

**Tabel 4.1**  
**Rasio Ekonomis Pemerintah Kota Medan**

<b>Tahun</b>	<b>Realisasi Belanja Daerah</b>	<b>Anggaran Belanja Daerah</b>	<b>Rasio Ekonomi</b>
2012	Rp. 3.021.172.391.041,67	Rp. 4.080.935.662.619	74%
2013	Rp. 3.224.449.048.408,88	Rp. 4.237.560.638.891	76%
2014	Rp. 3.723.643.299.085,60	Rp. 4.625.169.942.881	80%
2015	Rp. 4.374.968.274.136,94	Rp. 5.467.952.757.114	80%
2016	Rp. 4.532.672.134.655,15	Rp. 5.735.922.591.995	79%

*Sumber: Laporan Realisasi Anggaran yang telah diolah*

Dilihat dari tabel 4.1, maka untuk Rasio ekonomi Pemerintah Kota Medan yang diukur dalam 5 tahun, dimana untuk tahun 2012 rasio ekonomis sebesar 74%, yang termasuk dalam kategori kurang ekonomis karena diantara 60% sampai 80%. Untuk tahun 2013 rasio ekonomis mengalami peningkatan menjadi 76%, tetapi masih termasuk dalam kategori kurang ekonomis karena diantara 60% sampai 80%. Ditahun 2014 rasio ekonomis mengalami peningkatan menjadi 80%, yang termasuk dalam kategori cukup ekonomis karena berada diantara 80% dan 90%. Untuk tahun 2015 rasio ekonomis mengalami nilai yang sama dengan tahun 2014 sebesar 80%, yang termasuk dalam kategori cukup ekonomis karena diantara 60% sampai 80%. Ditahun 2016 rasio ekonomis mengalami penurunan menjadi 79%, yang termasuk dalam kategori kurang ekonomis karena diantara 60% sampai 80%. Dimana standar dari rasio ekonomis sebesar 100% yang dapat dikatakan bahwa Pemerintah Daerah Kota Medan belum maksimal dalam pencapaian target belanja daerah.

Rasio ekonomis sering disebut penghematan yang mencakup pengelolaan secara cermat dan tidak ada pemborosan. Dengan semakin besar persentase ekonomis maka kinerja keuangan pemerintah daerah semakin baik. (Mahsun,2006: 179).

b. Rasio Efisiensi

Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antar output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan. Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana seminimum mungkin. Efisiensi digunakan untuk menggambarkan perbandingan antara realisasi belanja dengan realisasi pendapatan (Salnatun, 2017).

Kinerja pemerintah daerah Kota Medan dikatakan efisien apabila rasio yang dihasilkan atau dicapai adalah  $< 1$  atau tidak lebih dari 100%. Semakin kecil nilai rasio efisiensi maka semakin baik kinerja pemerintah daerah Kota Medan.

Berikut diuraikan perhitungan rasio efisiensi berdasarkan rumus yang digunakan yaitu sebagai berikut:

$$Efisiensi = \frac{Realisasi\ biaya\ untuk\ memperoleh\ pendapatan}{Realisasi\ pendapatan} \times 100\%$$

Ketentuan:

- 1) Jika  $> 100\%$  maka Tidak Efisien
- 2) Jika  $90\%-100\%$  maka Kurang Efisien
- 3) Jika  $80\%-90\%$  maka Cukup Efisien
- 4) Jika  $60\%-80\%$  maka Efisien
- 5) Jika  $< 60\%$  maka Sangat Efisien.

**Tabel 4.2**  
**Rasio Efisiensi Pemerintah Kota Medan**

<b>Tahun</b>	<b>Realisasi Belanja Daerah</b>	<b>Realisasi Pendapatan</b>	<b>Rasio Efisiensi</b>
2012	Rp. 3.021.172.391.041,67	Rp. 2.998.203.912.475,38	101%
2013	Rp. 3.224.449.048.408,88	Rp. 3.276.344.285.159,73	98%
2014	Rp. 3.723.643.299.085,60	Rp. 4.042.115.828.231,62	92%
2015	Rp. 4.374.968.274.136,94	Rp. 4.259.044.490.715,42	103%
2016	Rp. 4.532.672.134.655,15	Rp. 4.308.116.916.024,91	105%

*Sumber: Laporan Realisasi Anggaran yang telah diolah*

Dilihat dari tabel 4.2, maka untuk Rasio efisiensi Pemerintah Kota Medan yang diukur dalam 5 tahun, dimana untuk tahun 2012 rasio efisiensi sebesar 101%, yang termasuk dalam kategori tidak efisien karena untuk tahun 2012 berada diatas 100%. Untuk tahun 2013 rasio efisiensi mengalami penurunan menjadi 98%, tetapi masih termasuk dalam kategori kurang efisien karena diantara 90% sampai 100%. Ditahun 2014 rasio efisiensi mengalami penurunan menjadi 92%, yang termasuk dalam kategori kurang efisien karena berada diantara 90% dan 100%. Untuk tahun 2015 rasio efisiensi mengalami peningkatan menjadi 103% yang termasuk dalam kategori tidak efisien karena berada diatas 100%. Ditahun 2016 rasio efisiensi mengalami peningkatan menjadi 105%, yang termasuk dalam kategori tidak efisien karena berada diatas 100%.

Melalui analisis efisien dapat diketahui seberapa besar efisien dalam belanja daerah dalam meningkatkan pendapatan daerah Kota Medan. Dengan perhitungan rasio efisiensi ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar belanja daerah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Medan dalam meningkatkan pendapatan daerah.

c. Rasio Efektivitas

Efektivitas merupakan rasio yang menggambarkan akibat dari dampak (*outcome*) dari output program dalam mencapai tujuan program. Semakin besar output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi.

Kinerja Pemerintah Daerah Kota Medan dikatakan efektif apabila rasio yang dihasilkan atau dicapai adalah lebih dari 100%. Semakin tinggi nilai rasio efektivitas maka semakin baik kinerja Pemerintah Daerah Kota Medan (Halim, 2002).

Berikut diuraikan perhitungan rasio efisiensi berdasarkan rumus yang digunakan yaitu sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi pendapatan}}{\text{Target pendapatan}} \times 100\%$$

Ketentuan:

- 1) Jika > 100% maka Sangat Efektif
- 2) Jika 90%-100% maka Efektif
- 3) Jika 80%-90% maka Cukup Efektif
- 4) Jika 60%-80% maka Kurang Efektif
- 5) Jika < 60% maka Tidak Efektif

**Tabel 4.3**  
**Rasio Efektivitas Pemerintah Kota Medan**

<b>Tahun</b>	<b>Realisasi Pendapatan</b>	<b>Anggaran Pendapatan</b>	<b>Rasio Efektivitas</b>
2012	Rp. 2.998.203.912.475,38	Rp. 4.034.121.333.860,45	74%
2013	Rp. 3.276.344.285.159,73	Rp. 4.106.900.462.377,32	80%
2014	Rp. 4.042.115.828.231,62	Rp. 4.560.412.529.543,87	89%
2015	Rp. 4.259.044.490.715,42	Rp. 5.046.111.839.162,45	84%
2016	Rp. 4.308.116.916.024,91	Rp. 5.490.162.683.364,97	78%

*Sumber: Laporan Realisasi Anggaran yang telah diolah*

Dapat dilihat dari tabel 4.3 untuk target pendapatan daerah Pemerintah Daerah Kota Medan setiap tahunnya mengalami peningkatan, namun tidak untuk tahun 2016 yang mengalami penurunan untuk tingkat realisasi pendapatan daerah Pemerintah Daerah Kota Medan. Untuk tahun 2012 rasio efektivitas sebesar 74%, yang termasuk dalam kategori kurang efektif karena berada diantara 60% sampai 80%. Sedangkan untuk tahun 2013 mengalami peningkatan menjadi 80% yang termasuk dalam kategori cukup efektif karena berada diantara 80% sampai 90%. Untuk tahun 2014 mengalami peningkatan menjadi 89% yang termasuk dalam kategori cukup efektif karena berada diantara 80% sampai 90%. Ditahun 2015 mengalami penurunan menjadi 84% yang termasuk dalam kategori cukup efektif karena berada diantara 80% sampai 90%. Sedangkan untuk tahun 2016 rasio efektivitas mengalami penurunan menjadi 78%, yang termasuk dalam kategori kurang efektif karena berada diantara 60% sampai 80%.

Melalui analisis efektivitas dapat diketahui seberapa besar realisasi pendapatan daerah terhadap target yang seharusnya dicapai pada periode tertentu. Dengan adanya penargetan realisasi pendapatan daerah dimaksudkan agar mendorong kinerja pemerintah daerah dalam mencapai penerimaan daerah yang tinggi.

### **3. Hasil Wawancara**

#### **a. Anggaran Pendapatan**

Menurut responden mengenai anggaran pendapatan dari segi penyusunan anggaran pendapatan dilakukan dengan cara terkomputerisasi dan proses penyusunan APBD sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah mengajukan rancangan peraturan daerah tentang APBD, disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD pada minggu pertama bulan Oktober tahun sebelumnya. Pengambilan keputusan oleh DPRD mengenai rancangan peraturan daerah tentang APBD dilakukan selambat-lambatnya satu bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan.
2. Sesudah RAPBD disetujui oleh DPR, RAPBD kemudian ditetapkan menjadi APBD melalui Peraturan Daerah yang diajukan Pemerintah Daerah, maka untuk membiayai keperluan setiap bulan Pemerintah Daerah dapat melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya.
3. Setelah APBD ditetapkan dengan peraturan daerah, pelaksanaannya dituangkan lebih lanjut dengan keputusan Gubernur/Bupati/Walikota.

Dalam proses penyusunan anggaran, mengacu pada Peraturan Pemerintah 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pihak-pihak yang terlibat dalam proses penyusunan anggaran dapat dibagi menjadi tiga kategori utama yaitu:

1. Eksekutif, secara umum eksekutif bertanggungjawab untuk membuat keputusan dan melaksanakan undang-undang negara. Eksekutif

bertanggungjawab untuk merancang anggaran. Eksekutif juga harus membuat kerangka pengeluaran jangka menengah, mengatur seluruh sumber daya keuangan negara dan memonitor departemen dalam membelanjakan uang negara.

2. Legislatif, membuat dan mengesahkan undang-undang serta mengawasi eksekutif. Reformasi proses anggaran mencoba merorganisasi proses anggaran, sehingga legislatif lebih berperan dalam menjalankan fungsi pengawasannya. Sebenarnya legislatif mempunyai wewenang untuk mengubah anggaran, tetapi tidak dapat membuat ulang anggaran, melainkan hanya dengan mengubah pembelanjaan dalam anggaran. Legislatif bertanggungjawab menentukan visi, misi, tujuan, arah dan kebijakan, strategi, dan penentuan prioritas secara luas baik ditingkat nasional maupun daerah. Tanggungjawab utamanya adalah memformulasikan strategi di tingkat nasional dan di tingkat daerah. Reformasi anggaran harus dapat meningkatkan peran legislatif dalam proses anggaran. Kemampuan legislatif untuk memenuhi kewajibannya terkadang dibatasi oleh keterbatasan waktu untuk mengkaji dan membahas anggaran dalam komisi. Keadaan tersebut menyebabkan peran legislatif berkurang karena cenderung hanya sebagai formalitas dalam proses anggaran, sehingga tidak mereviewnya secara lebih mendalam.
3. Masyarakat, keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunan anggaran diharapkan akan mampu mengatasi berbagai permasalahan anggaran, seperti kebocoran dan pemborosan atau penyimpangan

pengalokasian anggaran yang cenderung lebih berorientasi pada kepentingan birokrasi dan bukan kepentingan masyarakat. Peran aktif masyarakat dengan cara memberikan informasi, menyampaikan saran dan pendapatnya secara bertanggungjawab dan langsung kepada DPR atau melalui Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan organisasi sosial kemasyarakatan di daerah.

Komponen-komponen dalam penyusunan APBD yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Anggaran Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah. Adapun faktor yang menghambat selama proses penyusunan anggaran yaitu:

1. Pelaksanaan pendekatan partisipatif dalam perencanaan melalui mekanisme musrenbang yang belum maksimal.
2. Kualitas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Rensta) SKPD yang belum optimal.
3. Adanya intervensi pada proses penyusunan perencanaan.
4. Koordinasi antar SKPD masih lemah.
5. Sumber Daya Manusia (SDM) yang kurang kompeten dalam manajemen perencanaan dan penganggaran.
6. Faktor team work dan komitmen.
7. Intervensi dan hak budget DPRD terlalu kuat.
8. Sumber Daya Manusia (SDM) evaluasi anggaran pada pemerintah provinsi.

Penyebab rendahnya penyerapan anggaran di daerah adalah lamanya proses pembuatan rancangan anggaran atau perubahan, ketakutan pemerintah daerah

atas tuduhan korupsi, sistem birokrasi yang berbelit-belit, dan kurang akuratnya perencanaan pembangunan daerah. Selama tahap realisasi anggaran, kegiatan dalam pencairan anggaran diantaranya:

1. Pihak ketiga selaku rekanan atau penyedia barang/jasa yang mengajukan tagihan kepada pemerintah.
2. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang mengajukan SPP-LS/SPP-GUP pada suatu kantor atau satuan kerja.
3. Pejabat penguji SPP atau penerbit SPM yang melakukan pengujian SPP yang diajukan PPK dan menerbitkan SPM.
4. KPPN selaku kuasa BUN, menerbitkan SP2D setelah menerima SPM dari kantor atau satuan kerja.
5. Pihak perbankan selaku bank operasional KPPN yang melakukan pemindahbukuan sejumlah uang ke rekening yang berhak.

Sisa anggaran tahun lalu dapat dijadikan sumber penerimaan tahun berikutnya dengan penambahan anggaran pendapatan tahun berikutnya. Jika terjadi kasus hal yang mendadak, dana perimbangan bisa digunakan tetapi tidak untuk menutupi pengeluaran daerah melainkan untuk bantuan sosial.

### **B. *Value for Money***

Menurut responden mengenai *value for money* untuk mendapatkan nilai yang lebih ekonomis, tidak perlu melakukan survei harga untuk mengetahui perbandingan harga karena pemerintah sudah memberikan daftar pedoman harga jadi tinggal menggunakan anggaran untuk belanja sesuai dengan harga yang sudah ditetapkan. Sedangkan mengenai input sudah digunakan untuk

pelaksanaan suatu kebijakan maupun aktivitas lainnya sudah dilaksanakan untuk belanja daerah yang sesuai dengan tercantum dalam APBD.

Untuk efisiensi, penggunaan realisasi belanja daerah dalam penggunaannya sudah diminimalkan biaya realisasi belanja daerahnya untuk memaksimalkan hasil dari belanja tersebut. Sedangkan untuk pemakaian dana output yang berlebih itu tidak ada karena dana output sudah dirancang sedemikian rupa untuk penggunaannya masing-masing.

Penyebab rendahnya penyerapan anggaran di daerah adalah lamanya proses pembuatan rancangan anggaran atau perubahan, ketakutan pemerintah daerah atas tuduhan korupsi, sistem birokrasi yang berbelit-belit, dan kurang akuratnya perencanaan pembangunan daerah. Adapun dampak yang dihasilkan dari realisasi yang jauh dari target yang ditetapkan yaitu:

1. Rendahnya efek berganda perekonomian nasional

Dalam kondisi seperti ini, faktor belanja daerah menjadi hal utama sebagai stimulus pertumbuhan ekonomi, karena pertumbuhan ekonomi berefek pada rendahnya penciptaan lapangan kerja sehingga angka kemiskinan sulit diturunkan. Stimulus yang sangat diharapkan untuk membantu perekonomian adalah belanja barang dan belanja modal.

2. Anggaran yang dikeluarkan pemerintah menjadi sia-sia

Dalam mempersiapkan anggaran, pemerintah telah memperhitungkan defisit anggaran yang kemudian dibiayai melalui utang, jika utang sudah cair, adanya commitment fee yang harus

ditanggung pemerintah. Jika anggaran tidak segera digunakan, pemerintah tetap dibebani commitment fee tersebut.

### C. Pembahasan

#### 1. Faktor Penyebab rasio *Value for Money* pada Pemerintah Kota Medan Belum Memenuhi Standar

Dari penelitian yang telah dilakukan masing-masing rasio akan konsep *value for money* tergolong baik, akan tetapi berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan dikaitkan dengan teori, kinerja keuangan Pemerintah Kota Medan yang mana rasio ekonomisnya mengalami peningkatan dan penurunan setiap tahunnya tetapi tidak memenuhi kriteria ekonomis yang masih berada dikategori kurang ekonomis berlawanan dengan Arfan Ikhsan (2015:275) menyatakan semakin besar rasio ekonomis maka kinerja keuangan Pemerintah Daerah semakin baik. Rasio efisiensi meskipun ada yang mengalami penurunan tetapi tetap tidak memenuhi kriteria efisien, Arfan Ikhsan (2015:275) menyatakan semakin kecil rasio efisiensi maka kinerja keuangan Pemerintah Daerah semakin baik. Rasio efektivitas juga mengalami hal yang serupa yaitu ada yang mengalami peningkatan dan ada yang mengalami penurunan, kondisi ini masih dibilang belum baik karena tidak sesuai dengan Abdul Halim (2002:128) menyatakan semakin tinggi tingkat rasio efektivitasnya maka menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik.

Faktor penyebab rasio *value for money* pada pemerintah kota medan belum memenuhi standar adalah:

a. Rasio Ekonomi

Penyebab terjadinya rasio ekonomi tidak memenuhi kriteria ekonomis dikarenakan besarnya realisasi atas belanja daerah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Medan. Dengan menurunnya tingkat rasio ekonomis Pemerintah Daerah Kota Medan, menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kota Medan kurang mampu dalam melakukan memaksimalkan dana anggaran belanja daerah.

Berdasarkan dari wawancara yang dilakukan dimana Pemerintah Kota Medan dalam melakukan anggaran atas biaya yang dikeluarkan berdasarkan dari penentuan atas anggaran dari tahun sebelumnya tanpa melihat dari realisasi atas biaya yang dikeluarkan dari sebelumnya.

b. Rasio efisiensi

Penyebab terjadinya rasio efisiensi tidak memenuhi kriteria efisien dikarenakan besarnya belanja yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Medan, bahkan realisasi belanja daerah melebihi dari target yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Dengan meningkatnya rasio efisiensi menunjukkan bahwa kinerja pemerintah daerah mengalami penurunan dalam menghemat belanja daerah, atas pendapatan daerah yang diperoleh Pemerintah Kota Medan.

Berdasarkan dari wawancara yang dilakukan dimana Pemerintah Kota Medan belum bisa menekankan biaya operasi khususnya belanja pegawai yang dianggap terlalu besar anggaran belanja maupun realisasi belanja.

c. Rasio efektivitas

Penyebab terjadinya rasio efektivitas tidak memenuhi kriteria efektif dikarenakan pemerintah daerah tidak mampu dalam mencapai target pendapatan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah tersebut. Dengan menurunnya rasio efektivitas menunjukkan bahwa kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan daerah mengalami penurunan.

Berdasarkan dari wawancara yang dilakukan dimana Pemerintah Kota Medan untuk Pendapatan Asli Daerah yang mengalami penurunan terjadi dikarenakan penganggaran atau target yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota atas Pendapatan Asli Daerah belum dikelola dengan baik sehingga untuk pelayanan terhadap masyarakat belum terpenuhi.

Instansi diharapkan dapat lebih memperhatikan penggunaan anggaran belanja daerah, sehingga tidak terjadi lagi pemborosan dana yang melebihi dari target yang telah diberikan, dapat mengefisiensikan anggaran belanjanya dengan baik, sehingga lebih tepat dalam penggunaan dana yang diberikan oleh negara dan tidak terjadi penggunaan dana yang berlebihann untuk menjalankan program kerjanya. Instansi juga diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pelayanannya, sehingga dengan output yang cukup besar diharapkan dapat meningkatkan efektivitas, karena efektivitas suatu program dapat meningkat apabila masyarakat puas terhadap pelayanan yang diberikan kepada mereka.

## 2. Cara Meningkatkan Rasio *Value for Money* pada Pemerintah Kota Medan

Dari hasil penelitian pengukuran menggunakan konsep *value for money*, adapun cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan rasio *value for money* agar kedepannya dapat memenuhi kriteria adalah:

- a. Rasio Ekonomi yang tidak memenuhi kriteria, agar memaksimalkan penggunaan biaya untuk belanja modal, karena dana yang dikeluarkan untuk belanja modal masih terlalu jauh dari anggaran yang diberikan oleh pemerintah pusat dan dianggap belum maksimal dalam pelayanan masyarakat. Ekonomi sering disebut kehematan yang mencakup juga pengelolaan secara hati-hati atau cermat dan tidak ada pemborosan (Mardiasmo, 2002:131).
- b. Rasio Efisiensi yang tidak memenuhi kriteria efisien, agar menekankan biaya untuk belanja operasi khususnya belanja pegawai dan meningkatkan belanja modal agar kualitas masyarakat seimbang dengan belanja yang dikeluarkan pemerintah daerah. Menurut (Salnatun, 2016) proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah-rendahnya (*spending well*).
- c. Rasio Efektivitas yang tidak memenuhi kriteria efektif, berusaha semaksimal mungkin didalam meningkatkan pendapatan daerah khususnya pendapatan asli daerah (PAD) dengan baik melalui pajak maupun retribusi, sehingga hasil yang dicapai lebih kecil dari target yang telah ditetapkan. Mardiasmo (2002) menyatakan bahwa efektivitas

merupakan ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan efektif.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Pengukuran berdasarkan *Value for Money* terhadap APBD Pemerintah Kota Medan masih tergolong belum baik, karena indikator pengukurannya yaitu dari rasio ekonomis masih tergolong kurang ekonomis dikarenakan kecilnya jumlah belanja atas pemungutan pendapatan daerah pada Pemerintah Daerah Kota Medan, dengan menurunnya rasio ekonomis ini menunjukkan bahwa penggunaan dalam biaya pemungutan pendapatan daerah kurang ekonomis pada Pemerintah Daerah Kota Medan. Untuk rasio efisiensi masih tergolong tidak efisien karena disebabkan Pemerintah Daerah Kota Medan tidak mampu dalam mengefisiensikan biaya yang dikeluarkan atas pendapatan daerah Kota Medan. Sedangkan rasio efektivitas masih tergolong cukup efektif, penurunan yang terjadi untuk rasio efektivitas atas pendapatan daerah, menunjukkan bahwa kinerja dari pendapatan daerah mengalami penurunan atas memaksimalkan pendapatan daerah Pemerintah Kota Medan.
2. Cara yang dilakukan untuk meningkatkan rasio *value for money* pada Pemerintah Kota Medan adalah Pemerintah Kota Medan benar-benar optimal dalam mendapatkan pendapatan daerah, khususnya pendapatan asli daerah (PAD) dalam meningkatkan hasil kekayaan daerah agar mengurangi sumbangan dari pemerintah pusat dan penggunaan anggaran belanja daerah dilakukan tepat sasaran untuk memaksimalkan program

kerja Pemerintah Kota Medan, serta menekankan biaya untuk belanja operasi dan meningkatkan belanja modal agar kualitas pelayanan kepada masyarakat seimbang dengan belanja yang dikeluarkan pemerintah daerah.

## **B. Saran**

1. Dengan demikian instansi diharapkan dapat lebih memperhatikan penggunaan anggaran belanja daerah yang kurang dimaksimalkan, dan memperhatikan penggunaan anggaran belanja daerah yang berlebih sehingga tidak terjadi lagi pemborosan dana yang melebihi dari target yang telah diberikan, dapat mengefisiensikan anggaran belanjanya dengan baik, sehingga lebih tepat dalam penggunaan dana yang diberikan oleh negara dan tidak terjadi penggunaan dana yang berlebihann untuk menjalankan program kerjanya. Instansi juga diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pelayanannya, sehingga dengan output yang cukup besar diharapkan dapat meningkatkan efektivitas, karena efektivitas suatu program dapat meningkat apabila masyarakat puas terhadap pelayanan yang diberikan kepada mereka.
2. Bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian dengan topik yang sama, diharapkan untuk melakukan pengukuran kinerja tidak hanya diukur dengan konsep *value for money* saja, tetapi juga dapat diukur dengan menggunakan rasio keuangan daerah sehingga hasil penelitian menunjukkan hasil yang lebih baik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Apriza, Hanifa. 2016. *Analisis Value for Money Dalam Mengukur Kinerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara. Skripsi.* Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Bastian, Indra, dan Gatot Soepriyanto. 2003. *Sistem Akuntansi Sektor Publik, Konsep Untuk Pemerintah Daerah.* Jakarta: Salemba Empat.
- Bastian, Indra. 2006. *Akuntansi Sektor Publik, Suatu Pengantar.* Jakarta: Erlangga.
- Depdagri. 1997. Kepmendagri No.690.900.327. 1996, Tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan.
- Halim, Abdul. 2002. *Akuntansi dan Pengendalian Keuangan Daerah.* Yogyakarta: Seri Bunga Rampai UUP AMP YMPN.
- Halim, Abdul. 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah.* Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Sektor Publik, Akuntansi Keuangan Daerah.* Edisi Ketiga. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, Abdul. 2012. *Akuntansi Sektor Publik, Akuntansi Keuangan Daerah.* Edisi Keempat. Jakarta: Salemba Empat.
- Ikhsan, Arfan, Henny Triastuti, dan Muhammad Yamin. 2015. *Akuntansi Sektor Publik.* Bandung: Ciptapustaka.
- Mahsun, Muhammad. 2006. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik.* Yogyakarta: BPFE.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik.* Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik.* Yogyakarta: Andi.

- Nordiawan, Deddi. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Pane. 2017. Analisis *Value for Money* Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Medan Tahun 2011-2015. *Skripsi*. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Peraturan Pemerintah Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006, Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010, Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.
- Renyowijoyo, Muindro. 2012. *Akuntansi Sektor Publik Organisasi Non Laba Edisi Ketiga*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Salnatun, Untari. 2016. Analisis Pengukuran Kinerja Pemerintah Kota Medan Dengan Menggunakan Konsep *Value for Money* tahun 2011-2015. *Skripsi*. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### **Data Pribadi**

Nama : LAILA INTAN SYIFA NASRI  
Tempat / Tgl Lahir : Medan, 27 September 1996  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Warga Negara : Indonesia  
Alamat : Jl. Veteran sukoharjo Psr V No. 27A  
Anak Ke : 1 dari 3 bersaudara

### **Nama Orang Tua**

Ayah : Drs. Harun Nasib, MS. SPd.I  
Ibu : Sri Darmawati Yunus  
Alamat : Jl. Veteran sukoharjo Psr V No. 27A

### **Pendidikan Formal**

1. SD Swasta Sinar Husni Tahun 2008
2. SMP NEGERI 1 Labuhan Deli Tahun 2011
3. SMK Swasta Pangeran Antasari Tahun 2014
4. Kuliah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Tahun 2018

Medan, Maret 2018

LAILA INTAN SYIFA NASRI

## PERNYATAAN SKRIPSI

Saya bertanda tangan dibawah ini:

Nama : LAILA INTAN SYIFA NASRI  
NPM : 1405170507  
Program : Strata - 1  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
Program Studi : Akuntansi  
Judul : Analisis *Value for Money* Anggaran Pendapatan pada  
Pemerintah Kota Medan

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa data-data dalam skripsi atau data-data lainnya adalah benar saya peroleh dari KANTOR WALIKOTA MEDAN.

Dan apabila ternyata dikemudian hari data-data dari skripsi ini salah dan merupakan hasil **PLAGIAT** karya orang lain maka dengan ini saya bersedia menerima sanksi akademik.

Medan, Maret 2018

Saya yang menyatakan

LAILA INTAN SYIFA NASRI

## LAMPIRAN 1

### Klasifikasi Pengukuran Ekonomis

<b>Persentase</b>	<b>Kriteria</b>
100% Keatas	Sangat Ekonomis
90%-100%	Ekonomis
80%-90%	Cukup Ekonomis
60%-80%	Kurang Ekonomis
Kurang dari 60%	Tidak Ekonomis

*Sumber: Kepmendagri No.600.900-327*

### Klasifikasi Pengukuran Efisiensi

<b>Persentase</b>	<b>Kriteria</b>
100% Keatas	Tidak Efisien
90%-100%	Kurang Efisien
80%-90%	Cukup Efisien
60%-80%	Efisien
Kurang dari 60%	Sangat Efisien

*Sumber: Kepmendagri No.600.900-327*

### **Klasifikasi Pengukuran Efektivitas**

<b>Persentase</b>	<b>Kriteria</b>
100% Keatas	Sangat Efektif
90%-100%	Efektif
80%-90%	Cukup Efektif
60%-80%	Kurang Efektif
Kurang dari 60%	Tidak Efektif

*Sumber: Kepmendagri No.600.900-327*

## LEMBAR WAWANCARA

Nama Responden : Bapak Arfan Anshari Rangkuti, SE.,M.Si

Jabatan : Kepala Sub Bidang Badan Pengelola Keuangan dan Aset

Daerah (BPKAD) Kota Medan.

No.	Daftar Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimana proses penyusunan anggaran pendapatan? Apakah masih dilakukan dengan manual atau terkomputerisasi?	
2	Dalam proses penyusunan anggaran, siapa saja yang dilibatkan?	
3	Apakah dalam penyusunan anggaran berdasarkan aturan yang berlaku?	
4	Bagaimana menentukan komponen-komponen dalam penyusunan anggaran?	
5	Apa saja faktor yang menghambat proses penyusunan anggaran?	
6	Apa penyebab jika serapan/realisasi anggaran rendah?	
7	Selama tahap realisasi anggaran, bagaimana kegiatan dalam pencairan anggarannya?	
8	Apakah sisa anggaran tahun lalu dapat dijadikan sumber penerimaan untuk tahun berikutnya? Jika bisa maka sisa anggaran tahun lalu tersebut dikelompokkan dibagian penerimaan yang mana?	
9	Apakah anggaran pendapatan asli daerah dan dana perimbangan dapat digunakan untuk menutupi pengeluaran daerah jika anggaran kurang untuk pengeluaran (belanja) pemerintah daerah?	
10	Untuk pengeluaran (belanja), apakah diperlukan survei harga terlebih dahulu untuk mengetahui perbandingan harga sehingga dapat menentukan harga yang terendah agar tidak terjadi pemborosan?	

11	Apakah input sudah digunakan untuk pelaksanaan suatu kebijakan program maupun aktivitas yang semestinya?	
12	Bagaimana penggunaan output di organisasi? Apakah penggunaannya diminimalkan dan hasilnya dimaksimalkan?	
13	Apakah ada pemakaian dana output lebih yang tidak terpakai?	
14	Apakah ada dampak yang dihasilkan dari realisasi yang jauh dari target yang ditetapkan?	
15	Apa yang menyebabkan realisasi tidak mencapai target yang sudah ditentukan?	